

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alamat : Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Jln Linmas

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada kami. Laporan ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Secara garis besar, LKjIP ini menyajikan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik selama satu tahun berjalan terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Di dalamnya mencakup analisis keberhasilan, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa pencapaian yang tertuang dalam laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan dan jajaran pegawai yang telah bekerja keras demi tercapainya visi dan misi instansi.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi demi perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja birokrasi di Indonesia.

Sangatta, 14 Januari 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Tejo Yuwono, S.Pd
Pembina Utama Muda IVc
NIP.197309162000121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	5
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	6
BAB II	8
PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	8
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III	15
AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja	15
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	16
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	16
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	17
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	18
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	18

3.1.6	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	19
3.1.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	20
3.1.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	21
3.2	Realisasi Anggaran	30
BAB IV		36
PENUTUP		36
LAMPIRAN		37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	5
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	8
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	9
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun n	9
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	10
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	11
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	Error!
	Bookmark not defined.	
Tabel 2.7	Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	16
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n	16
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	17
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	18
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	18
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	19
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	20
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	21
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

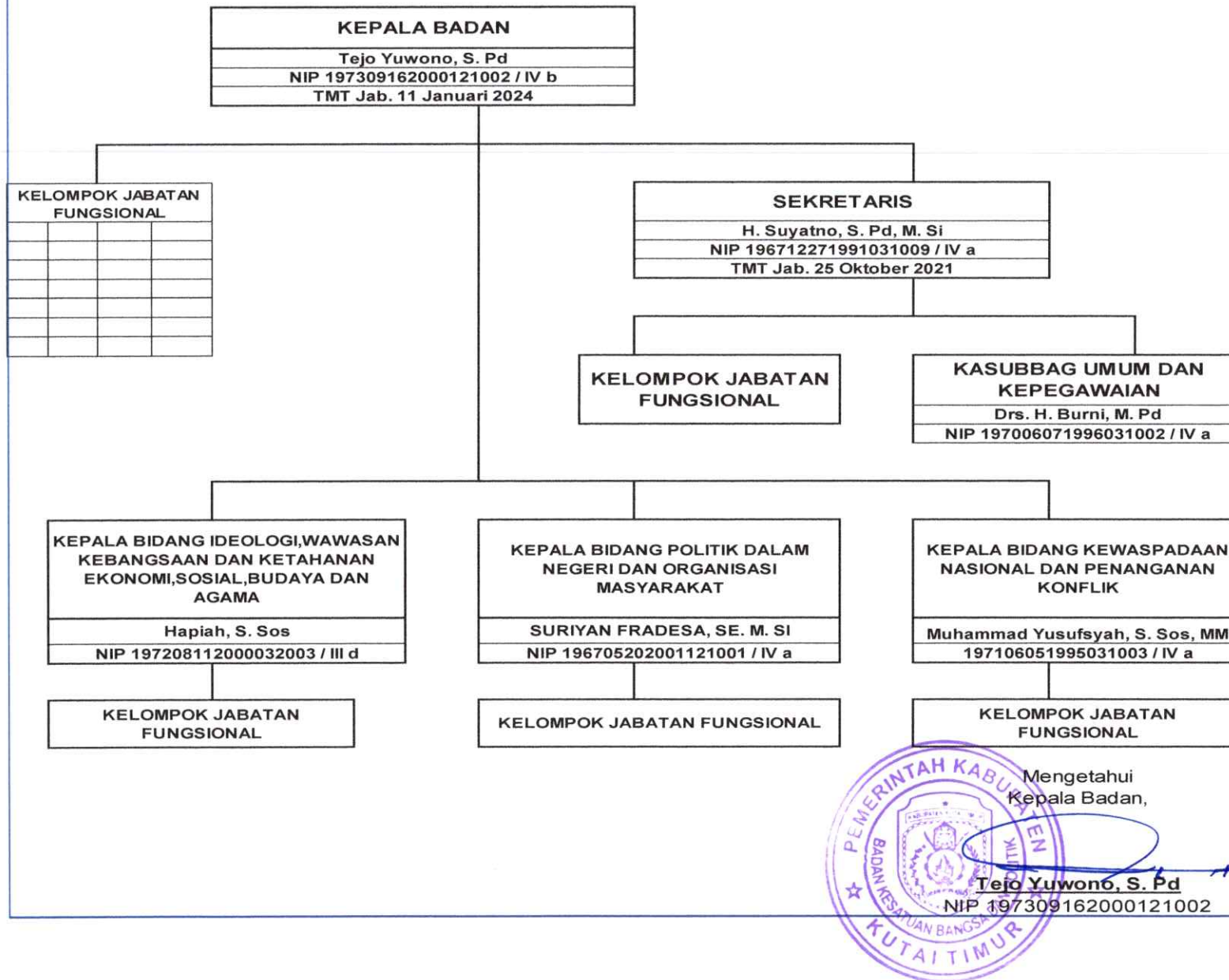
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Umum Yang Menjadi Kewenangan daerah yang di pimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah Dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Menyelenggarakan Tugas dan kewajiban tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas :

- Perumusan kebijakan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;
- Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- Pembinaan dan pelaksanaan kesatuan bangsa dan politik;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berikut bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1(2024)	Rp.101.288.691.714
APBD	Tahun n (2025)	Rp.31.382.474.291
Sumber Lainnya (Jika Ada)		

Sumber : Laporan keuangan SKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata cara reuiu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 tahun 2015 Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Review atas laporan kinerja di lingkungan pemerintah kabupaten kutai timur

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan Dan Akuntabel Berbasis Elektronik. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik			LSM/Organisasi yang Aktif	139	169	199	280	295
		1.4.12.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	139	169	199	280	295

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2021 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.4. 12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	1. 4. 12 #. 1	LSM/Organisasi yang Aktif			
1.4. 12. 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. 4. 12 .1 #0 .1	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Lembaga	upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan organisasi kemasyarakatan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.	Jumlah organisasi tahun sebelumnya yang terdaftar di tambah jumlah organisasi tahun berjalan

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.4.12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik			LSM/Organisasi yang Aktif	Lembaga	280
		1.4.12.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Lembaga	280

Sumber : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	LSM/Organisasi yang Aktif	280
1.4.12.1	LSM Organisasi yang Aktif	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	280

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.12.1.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah organisasi masyarakat yang aktif	280
1.4.12.1.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1
1.4.12.1.1.1.1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di daerah	1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Targe t
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.12. 1.1.1.2	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1
1.4.12. 1.1.1.3	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	11
1.4.12. 1.1.1.4	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300
1.4.12. 1.1.1.5	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50
1.4.12. 1.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	100
1.4.12. 1.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5
1.4.12. 1.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7
1.4.12. 1.2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-
1.4.12. 1.2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	-
1.4.12. 1.2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.12. 1.2.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4
1.4.12. 1.2.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1
1.4.12. 1.2.2.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan barang milik daerah SKPD	-
1.4.12. 1.2.2.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2
1.4.12. 1.2.3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1
1.4.12. 1.2.3.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38
1.4.12. 1.2.3.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-
1.4.12. 1.2.3.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	1
1.4.12. 1.2.3.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2
1.4.12. 1.2.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian PD	1
1.4.12. 1.2.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1
1.4.12. 1.2.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35
1.4.12. 1.2.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3
1.4.12. 1.2.5.1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan.	1
1.4.12. 1.2.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	2
1.4.12. 1.2.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	2
1.4.12. 1.2.5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35
1.4.12. 1.2.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.12. 1.2.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	12
1.4.12. 1.2.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	12
1.4.12. 1.2.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1
1.4.12. 1.2.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaaraandinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	33
1.4.12. 1.2.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
1.4.12. 1.2.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47
1.4.12. 1.2.9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1
1.4.12. 1.2.9.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan.	2
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	12
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	25

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	LSM/Organisasi yang Aktif	280	252	90,00	Tinggi	Bidang Ormas
1.4.12.1	LSM Organisasi yang Aktif	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	280	252	90,00	Tinggi	Bidang Ormas

Sumber : Berita Acara Evaluasi Rencana Kerja 2025

Uraian penjelasan tabel :

Adanya antusias Kesadaran Organisasi masyarakat untuk Melaporkan keaktifan Organisasinya.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4. 12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	LSM/Organisasi yang Aktif	228	169	199	280	252	100
1.4. 12. 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	228	264	199	280	252	100

Sumber : Bidang Ormas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Uraian penjelasan tabel :

Faktor Pendorong Realisasi tidak menurun di karenakan antusias organisasi yang telah Mendaftar/Melaporkan Kepengurusannya Berdasarkan periodenya, Sehingga semua Ormas mendaftarkan setiap tahunnya.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No .	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.4. 12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	LSM/Organisasi yang Aktif	252	280	90
1.4. 12. 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	252	280	90

Sumber : Bidang Ormas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Uraian penjelasan tabel :

- Adanya Antusias Pendaftaran Ormas dari kementrian dalamNegeri,sehingga Banyak Ormas yang ikut mendaftar ketika penerbitan SKT (Surat keterangan terdaftar).
- Adanya kerja sama di bidang Ormas untuk memaksimalkan kinerja Tim Ormas.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.4. 12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	LSM/Organisasi yang Aktif	252		90,00
1.4. 12. 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	252		90,00

Sumber : Bidang Ormas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

- Permendagri 57 tahun 2017 Tentang pendaftaran organisasi kemasyarakatan.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4. 12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel	LSM/Organisasi yang Aktif	280	252	90	Berhasil	Dengan Mengadakan Pembinaan dan Sosialisasi.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	berbasis Elektronik						
1.4. 12.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	280	252	90,00	Berhasil	Dengan Mengadakan Pembinaan dan Sosialisasi.

Sumber : Bidang Ormas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Uraian penjelasan tabel :

Adanya Antusias Kesadaran Organisasi Masyarakat untuk melaporkan keaktifan organisasinya.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4. 12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	280	252	90	31.382.474.291	28.146.489.501	89,69	Efisien
1.4. 12. 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	280	252	90	31.382.474.291	28.146.489.501	89,69	Efisien

Sumber : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Uraian penjelasan tabel:

Adanya Faktor Pendorong Sehingga Realisasi Efisiensi salah satunya pemahaman Ormas terhadap aturan dan regulasi yang berlaku dan SDM yang cukup maksimal dan efektif untuk keberlangsungan kinerja.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4. 12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	LSM/Organisasi yang Aktif						
1.4. 12. 1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah organisasi masyarakat yang aktif	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.1. 1				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	100,00	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Organisasi Kemasyarakatan			
1.4. 12. 1.1. 1.1				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di daerah	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.1. 1.2				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	100,00	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4. 12. 1.1. 1.3				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	72,57	Menunjang	
1.4. 12. 1.1. 1.4				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.1. 1.5				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas,	100,00	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
1.4. 12. 1.2				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 1.2				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	
1.4. 12. 1.2. 1.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	-	-	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					dan penyusunan dokumen RKA-SKPD			
1.4. 12. 1.2. 1.4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 1.5				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 2				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 2.1				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan barang milik daerah SKPD	-	-	
1.4. 12. 1.2. 2.2				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	100,00	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Daerah SKPD			
1.4. 12. 1.2. 3				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 3.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 3.2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	-	
1.4. 12. 1.2. 3.3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 3.4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100,00	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4. 12. 1.2. 4				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian PD	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 4.1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 4.2				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 5				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 5.1				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausaha an arsip dinamis pada SKPD	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 5.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	100,00	Menunjang	
				Penyediaan peralatan Rumah tangga	Junlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2.				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logoistik	100,00	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.3					kantor yang di sediakan			
1.4. 12. 1.2. 5.4				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara aan rapat koordinasi an konsultasi SKPD	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 7				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	100,00	Menunjan g	
1.4. 12. 1.2. 7.1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,s umber daya air dan listrik yang di sediakan	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 7.2				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 8				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaa an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	100,00	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4. 12. 1.2. 8.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraandin as jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 8.2				Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 8.3				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00	Menunjang	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan administrasi umum peramngkat daerah	100,00	Menunjang	
				Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang di sediakan	100,00	Menunjang	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang di sediakan	100,00	Menunjang	
				Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disesdiakan	100,00	Menunjang	

Sumber : Laporan realisasi fisik dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel 3.8 di atas seluruh Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Menujang IKU Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4. 12. 1.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.266.653.000	1.927.232.078	90,00
1.4. 12. 1.1. 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.266.653.000	1.927.232.078	90,00
1.4. 12. 1.1. 1.1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	62.093.000	60.871.500	98,03
1.4. 12. 1.1. 1.2	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	63.345.000	63.336.000	99,99

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4. 12. 1.1. 1.3	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.751.236.000	1.446.497.000	82,60
1.4. 12. 1.1. 1.4	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	297.470.000	280.696.303	94,36
1.4. 12. 1.1. 1.5	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	92.509.000	75.831.275	81,97
1.4. 12. 1.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.379.675.774	13.740.837.950	89,34
1.4. 12. 1.2. 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	241.280.000	236.539.200	98,04
1.4. 12. 1.2. 1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	161.735.000	158.480.496	97,99
1.4. 12. 1.2. 1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-
1.4. 12. 1.2. 1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4. 12. 1.2. 1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.127.000	47.155.210	97,98
1.4. 12. 1.2. 1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.418.000	30.903.494	98,36
1.4. 12. 1.2. 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.781.720	35.696.000	99,76
1.4. 12. 1.2. 2.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-
1.4. 12. 1.2. 2.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	35.781.720	35.696.000	99,76
1.4. 12. 1.2. 3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.780.468.927	9.350.606.092	86,74
1.4. 12. 1.2. 3.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNbv	10.490.979.456	9.061.473.712	86,37
1.4. 12. 1.2. 3.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4. 12. 1.2. 3.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	196.299.471	196.228.600	99,96
1.4. 12. 1.2. 3.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	93.190.000	92.903.780	99,76
1.4. 12. 1.2. 4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	174.833.800	173.889.500	99,46
1.4. 12. 1.2. 4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	174.833.800	173.889.500	99,73
1.4. 12. 1.2. 4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
1.4. 12. 1.2. 5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	801.100.093	768.351.200	95,91
1.4. 12. 1.2. 5.1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	142.782.093	142.773.000	99,99
1.4. 12. 1.2. 5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.000.000	139.037.000	99,31
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.088.000	36.071.000	99,95

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4. 12. 1.2. 5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.000.000	154.281.000	82,95
1.4. 12. 1.2. 5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296.230.000	296.189.200	99,99
1.4. 12. 1.2. 7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	878.212.808	756.953.915	86,19
1.4. 12. 1.2. 7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.120.000	150.737.167	86,19
1.4. 12. 1.2. 7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	619.092.808	606.216.748	97,92
1.4. 12. 1.2. 8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.601.655.580	1.560.978.543	97,46
1.4. 12. 1.2. 8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	511.430.000	473.816.811	92,65
1.4. 12. 1.2. 8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	956.435.580	955.591.732	99,91
1.4. 12.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.790.000	131.570.000	98,34

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2. 8.3				

Sumber : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Uraian penjelasan tabel:

Dari Tabel 3.9 di atas rata-rata Capaian Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Mencapai 99,74 %.Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 nilai 99,74% Termasuk Kategori Capaian tinggi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 4 sasaran strategis dengan 4 sasaran strategis tercapai dan 0 sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Tidak ada karena semua telah berjalan sesuai rencana kerja tahun 2025 dan sejalan dengan realisasi kegiatan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Sangatta, 14 Januari 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Tejo Yuwono, S.Pd
Pembina Utama Muda IVc
NIP.197309162000121002